

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Yudi. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. *Bandung:Alfabeta*.
- Abdul Wahab, Solichin. (2012). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. *Jakarta: PT. Bumi Aksara*.
- Agustino, Leo. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. *Bandung: Alfabeta*.
- Akbar, M. Miftahul. (2020). Evaluasi Tingkat Kematangan *E-Government* dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo). *Tesis: Universitas Islam Indonesia*.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik: 1(1)*, 1-11
- Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan Publik. *Bandung: Pustaka Setia*
- Annisa, Citra. (2011). Implementasi E-Government Melalui Bursa Kerja Online pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. *Skripsi: Universitas Indonesia*
- Aprianty, Diah Rachma. (2014). Penerapan Kebijakan *E-Government* Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambuta Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan 4(4)*, 1589-1602
- Arikunto, S. & Abdul Jabar S.C. (2010). Evaluasi Program Pendidikan. *Jakarta: Bumi Aksara*
- Creswell, J. W. (2014). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. *California: Sage Publication*.
- Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. *Yogyakarta: Gadjah Mada University Press*.
- Handoyo, Eko. (2012). Kebijakan Publik. *Semarang: Widya Karya*.
- Huda, dkk. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarbaru. *Jurnal Fisip Uniska*.
- Indrajit, Richardus Eko. (2002). Membangun Aplikasi E-Government. *Jakarta: PT Alex Media Komputindo*
- Irawan, Muhammad. (2021). E-Government: Konsep, Esensi dan Studi Kasus. *Samarinda: Mulawarman University Press*.
- Krugman, Paul. R. (2009). The return of depression economics and the crisis of 2008. *New York, W.W. Norton*
- Leo Agustino, 2006, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, *Bandung, Alfabeta*.

- Lumbanraja, Anggita Doramia. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui *E-Government* pada *New Normal* dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law & Governance Journal*: 3(2), 220-232
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: *Sage Publications*. Terjemahan UI-Press.
- Moleong, Lexy. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda.
- Nadia, dkk. (2019). Evaluasi Kebijakan KTP Elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabui. *Jurnal Ilmu Muqodimah* 6(2), 319-323.
- Nia, Janati. (2015). Evaluasi Kebijakan Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Sebagai Bentuk Penerapan Identitas Berbasis *Single Identity Number* di Kabupaten Lampung Utara. *Tesis: Universitas Lampung*.
- Nugroho D, Riant. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Parson, Waynes. (2006). *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Puji, dkk. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (*E-Government*) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi*: 18(2), 212-225.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. (2005). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rifani, Denny Nazaria. (2021). Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *Sawala Jurnal Administrasi Negara*: 9(2), 115-124
- Rinanda, Rahmat Raff. (2020). Evaluasi Pelayanan Berbasis *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan. *Skripsi: Universitas Islam Riau*.
- Rukayat, Yayat. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasirjambu. *JIMIA: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 1(2): 55-65.
- Samodra, Wibawa. (1994). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Edisi ke-3. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA
- Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi, dan Kasus*. Yogyakarta: YPAPI.
- Taufiqurrahman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Negara*. FISIP Universitas Moestopo.

- Thomas R. Dye.(2005). *Understanding Public Policy*. New Jersey: *Pearson Education Inc.*
- Triningsih, Ayu. (2018). Implementasi Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Blitar: Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar. *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Turahmawati, Elvira. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi *e-Open* pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. *Jurnal Kybernan: 13*(1), 23-33.
- Wahyuni, dkk. (2019). Model Peningkatan Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Politik 1*:(1),1-15.
- Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. *Yogyakarta: CAPS*
- Yong, J. S. (2005). *E-Government in Asia: Enabling Public Service Innovation in the 21st Century*. Singapore: Times Edition.

Peraturan

Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002

Keputusan Walikota Bekasi No. 470/609/XII/2020

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 90 Tahun 2020

Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2021

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Situs

Situs Resmi BPS Kota Bekasi, diakses pada 7 Desember 2022, dari <https://bekasikota.bps.go.id/>

Situs Resmi Disdukcapil Kota Bekasi, diakses pada 2 April 2022, dari <https://disdukcapil.bekasikota.go.id/>